

PENULISAN HUKUM
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
36/PUU-XV/2017 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI



Oleh:

Muhammad Ibnu Arif

201310110311086

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2018

PENULISAN HUKUM
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
36/PUU-XV/2017 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu Hukum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2018

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-
XV/2017 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

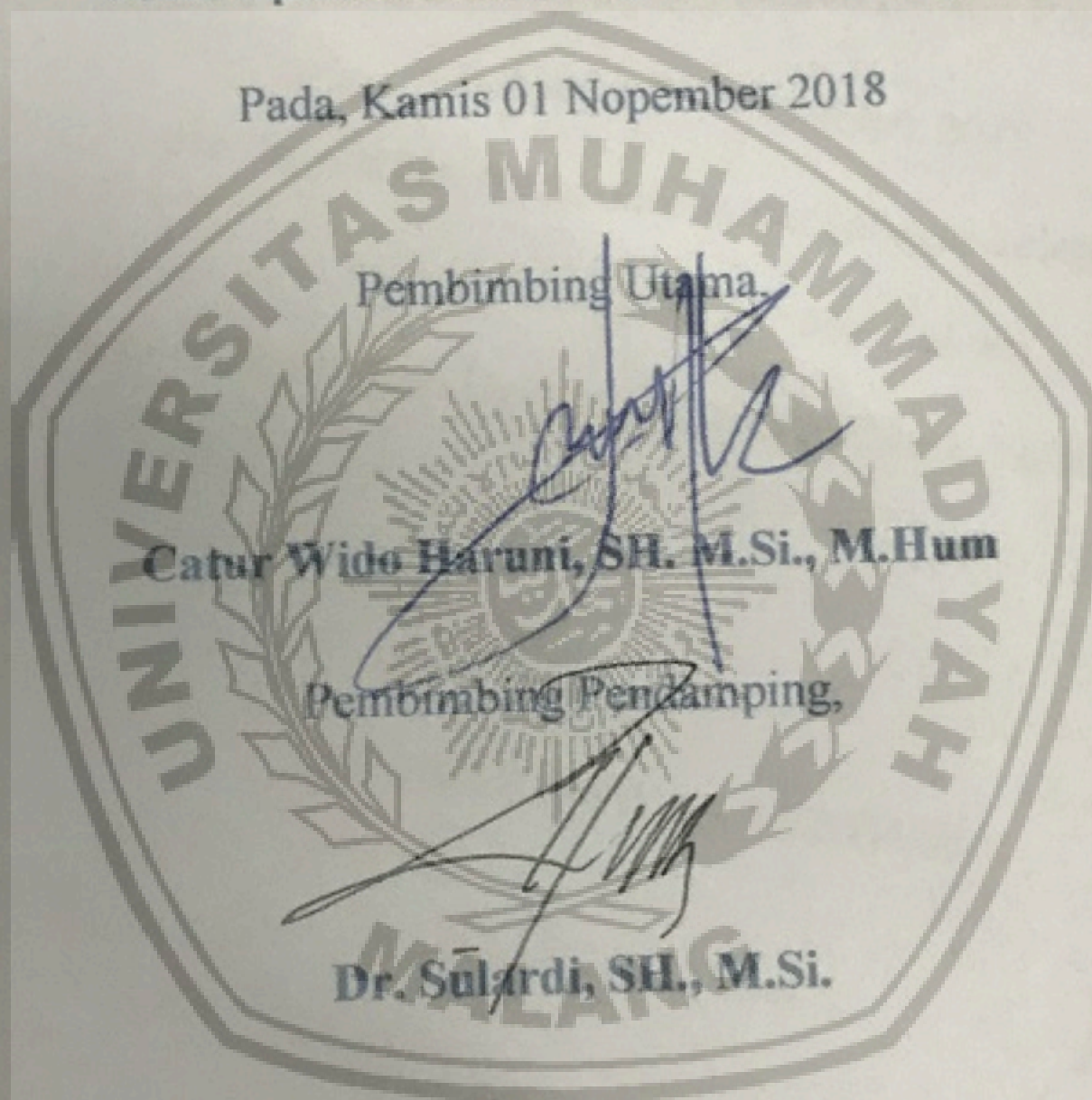
Diajukan Oleh:

MUHAMMD IBNU ARIF

201310110311086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 01 Nopember 2018



Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD IBNU ARIF

201310110311086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 01 Nopember 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

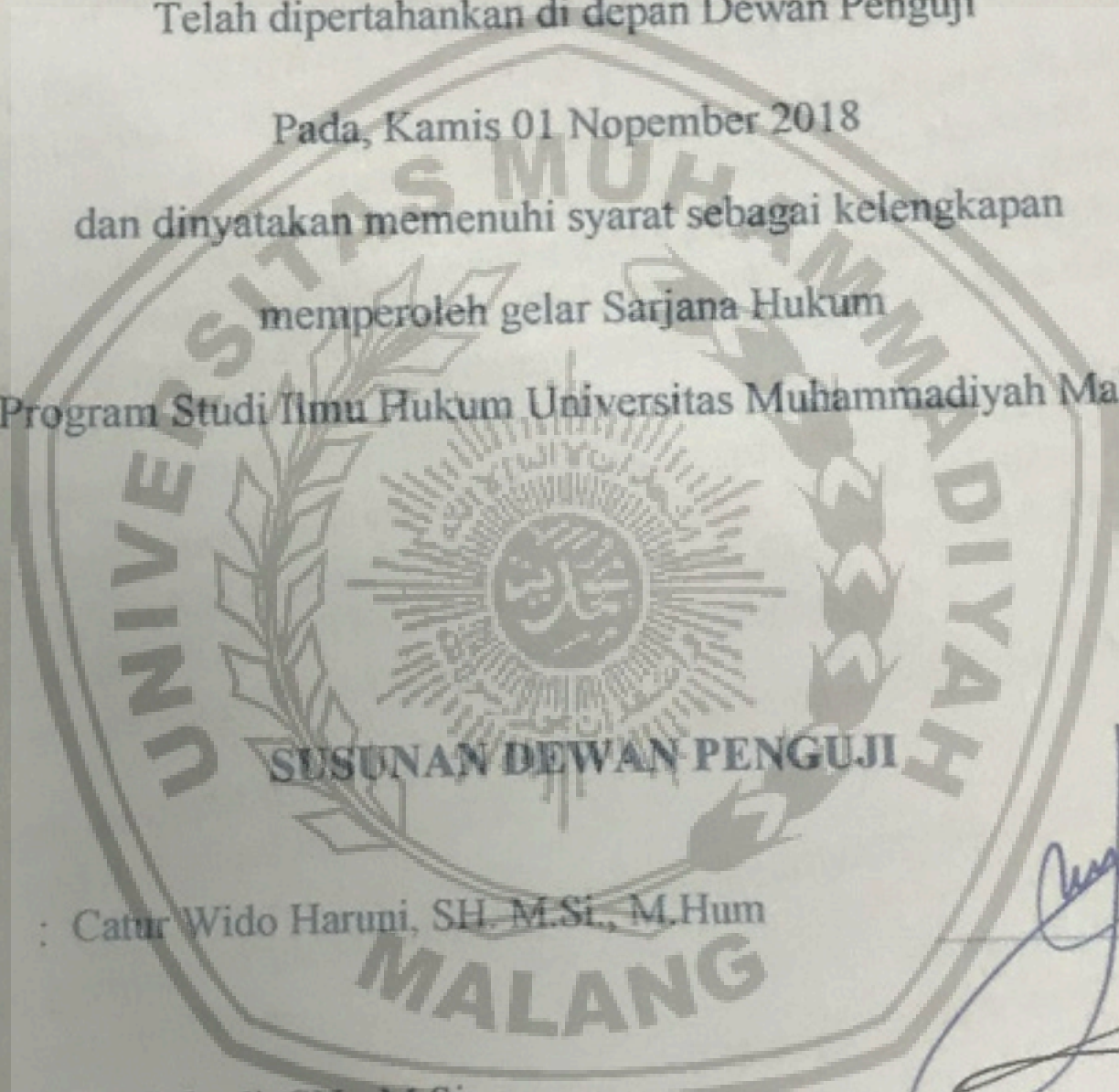
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibnu Arif
Nim : 201310110311086
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI” adalah benar-benar karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 2 November 2018
Yang menyatakan,

Muhammad Ibnu Arif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Harbentoni dan Yusda Feleningsih Terimakasih yang tidak ada hentinya, penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yang telah memberikan support secara materil dan immateril dari awal kuliah hingga detik ini.
2. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
3. Dr. Sulardi, SH., M. Si dan Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan arahan serta pengetahuan baru pada penulis.
4. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum. (Pembantu Dekan I), Dr. Haris, S.H.,M.Hum (Pembantu Dekan II), Said Noor P, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III), dan Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi motivator penulis;

5. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
6. Terkhusus untuk Citra Mei Dwiana Kartika Sari terimakasih sudah membantu dan direpoti oleh peneliti dalam melakukan penelitian sampai peneliti menyelesaikan penelitiannya.
7. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi	17
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	20
1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi.....	20
2. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi	25
3. Penafsiran Konstitusi	29
C. Tinjauan Tentang Konsistensi Hakim Dalam Membentuk Putusan	35
1. Pengertian Putusan.....	35
2. Pertimbangan dan Pengambilan Putusan Oleh MK.....	37
3. Jenis Putusan MK	39
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Posisi Kasus	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim	54
C. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang ditinjau dari aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.....	69
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

Daftar Pustaka

Buku:

- Bambang Sutyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta
- _____, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Profil Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketujuh, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- _____, 2010, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Maruarar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press

- Muhammad Arifin, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua
- Nurudy Hady, 2010, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press)
- Soeparmono, R. 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty)
- Taufiqqurahman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekteratriat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press: Jakarta

Skripsi/Thesis/Disertasi:

- Radian Salman, 2017, *Disertasi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi*, Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jurnal:

Bruce Ackerman, 2003, *The New Separation of Power*, *Harvard law Review*, Volume 113

Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015

M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 4 Agustus 2010

Mahfud MD, 2009, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, *JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16 OKTOBER 2009*

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Internet:

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, URL: <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-non-kementerian-2>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018

Kompas, 2017, Miryam Jadi Kurir Uang Korupsi E-KTP untuk Puluhan Anggota DPR, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/23/09321601/miryam.jadi.kurir.uang.korupsi.e-ktp.untuk.puluhan.anggota.dpr.>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018

Mahkamah Konstitusi, 2017, Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR, URL: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012#.Wp5wcOcxXDc>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Url: <Http://Www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Profilmk&Id=1>, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2018

Sindo News, 2017, DPR Tanya Dasar Hukum Penyadapan, Ini Jawaban KPK, URL: <https://nasional.sindonews.com/read/1243179/13/dpr-tanya-dasar-hukum-penyadapan-ini-jawaban-kpk-1506435658>, pada tanggal 15 Oktober 2018

Sindo News, 2018, Selama 2018, KPK Telah Lakukan 22 Kali OTT dan Jaring 78 Tersangka, URL: <https://nasional.sindonews.com/read/1343938/13/selama-2018-kpk-telah-lakukan-22-kali-ott-dan-jaring-78-tersangka-1538733513>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

Wikipedia, Thomas Aquinas, URL: <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

